

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu dituntut oleh seorang guru adalah bagaimana mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat dikuasai dan dipahami oleh peserta didik. Guru bukanlah yang memaksakan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, tetapi peserta didiklah yang dengan sadar untuk mencapai tujuan itu.

Pembentukan warga negara pada dasarnya itu harus melalui pendidikan yang berkompeten secara demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia menurut Kartini Kartono (2009:82) ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila dan UUD Tahun 1945. Hal ini ditegaskan pula

dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk waktak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah, banyak kendala yang dihadapi guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, baik yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, maupun yang berhubungan dengan prestasi yang ingin dicapai oleh siswa. Menurut Azhar Arsyad (2011:15), “dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting”. Dalam kegiatan tersebut sering kali ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara, karena salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.

Ketidakjelasan bahan yang akan disampaikan kepada siswa dapat disederhanakan dengan bantuan media. Mengingat pentingnya media pembelajaran di atas, maka seorang guru dituntut agar mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran PKn di Sekolah Menengah Atas.

Sudah saatnya dunia pendidikan mengakomodasikan berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Berhubungan dengan hal membaca, saat ini para generasi muda kita sangat kurang minat dalam budaya membaca. Inilah kelemahan yang dihadapi pada media cetak dalam hal ini bertema tentang politik, karena media cetak hanya berbentuk audio saja, sehingga membuat generasi muda kita jauh dari media cetak, akan tetapi media cetak juga memiliki kelebihan, yaitu dapat melatih budaya baca yang kurang.

Jangan sampai dunia pendidikan kita ini berdiri di puncak menara gading kehidupan yang akan mengasingkan anak-anak bangsa dari berbagai persoalan yang dihadapi negara ini. Untuk itu, diperlukan mata pelajaran yang mampu menjawab tantangan tersebut. Tidak heran jika di sekolah mata pelajaran yang bisa membelajarkan siswa tentang budaya politik di Indonesia adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang penting di sekolah, karena ditujukan untuk membentuk dan mempersiapkan generasi muda agar ikut berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat.

Salah satu prasyarat untuk menjadi generasi muda yang berpartisipasi dan memiliki pengetahuan politik, tertuang dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 15 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum sekolah yang digunakan adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini bertujuan

untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian otonomi kepada lembaga pendidikan dan melibatkan sekolah dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Sementara itu dalam Depdiknas (2006:271) menyatakan bahwa:

Bidang studi PKn juga merupakan bidang studi yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Komala Nurmalina (2008:3) adalah “mempersiapkan warga negara yang kritis, analitis, aktif, bersikap dan bertindak demokratis”. Hal ini mempunyai maksud para peserta didik diharapkan memiliki sikap kemampuan berpikir kritis, rasional dan aktif agar partisipasi yang dilakukan dalam membangun bangsa bersamaan dengan kecerdasan warga negara yang mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana menurut pandangan Cogan (1999:4) dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008:5) yang mengartikan PKn atau *civic education* sebagai “.....*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Selain aktif dalam masyarakat, keberadaan generasi muda merupakan aset yang berharga dalam kancah perpolitikan, sebab mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melangsungkan kehidupan bangsa dan negara.

Menurut Robert Browenhill and Patricia Smart dalam Idrus Affandi (2009:17) dan Kartini Kartono (2009:63), Pendidikan politik dalam terminologi ilmu politik dikenal sebagai “*Political forming* atau *politische building*”, yang disebut “*forming*” karena terkandung intensitas membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan yang disebut “*building*” itu pembentuk atau pendidikan diri sendiri. Oleh sebab itu, Pendidikan Politik itu sebagai pembentuk diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.

Menurut Kartini Kartono (2009:63):

Pendidikan Politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menojolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya.

Pendidikan Politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga Negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Pendidikan Politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali dan terkoordinasi, akan berkontribusi positif bagi pengembangan kesadaran politik atau melek politik (*political literacy*), sebab hakikat Pendidikan Politik adalah meningkatkan kesadaran rakyat atau warga negara akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Menurut Kartini Kartono (2009:64,80):

Pendidikan Politik merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan adanya

pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan.

Saat ini pemahaman peserta didik tentang Pendidikan Politik di sekolah sedikit meningkat karena dari tahun ke tahun, proses pembelajaran ini dikombinasikan menggunakan media belajar, sehingga membuat siswa itu antusias terhadap pemanfaatan penggunaan berita politik, karena dirasa sangat bermanfaat bagi pendidikan politik di persekolahan khususnya dalam pembelajaran PKn. Ada juga kendala dalam pemanfaatannya, yaitu dengan penggunaan istilah-istilah asing dalam pemberitaan politik itu, yang memungkinkan peserta didik menjadi kurang jelas dan tidak bisa mengartikan intisari dari berita politik tersebut, karena dengan adanya pemanfaatan berita politik sebagai media belajar di usahakan peserta didik akan lebih memahami pembelajaran politik dalam PKn tersebut sehingga dapat terbentuk peserta didik yang melek politik (*Politic Literacy*) di setiap kegiatannya dalam memberikan aspirasi, contohnya pemilihan ketua kelas.

● Tujuan Pendidikan Politik di Indonesia menurut Kartini Kartono (2009:82) ialah:

Menampilkan insan/humani setiap individu yang unik selaku warga negara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin, dan agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara.

Berita politik dapat dijadikan sebagai media belajar dalam pembelajaran PKn. Sebelum penggunaan media, terlebih dahulu seorang pengajar harus membuat strategi pembelajaran yang matang sehingga peserta didik mengerti dan paham akan materi yang disampaikan. Menurut Syaiful

Bahari Djamarah (2010:5), ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar, diantaranya:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dalam kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.
2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.
3. Memilih dan menetapkan *prosedur, metode, teknik* belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau criteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.

Dengan pembelajaran yang menggunakan media berita politik seperti ini peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kajian yang ada, sehingga dapat dikatakan pemanfaatan berita politik di persekolahan tersebut sangatlah penting. Pembelajaran seperti ini banyak manfaat yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran PKn dan membuat siswa itu berpikir kritis, rasional, kreatif, melek politik, dan aktif dalam belajar serta tidak merasa bosan dalam pembelajaran PKn.

Setelah melakukan prapenelitian dengan menggunakan wawancara dan angket yang respondennya hanya diwakilkan oleh peserta didik dari beberapa kelas XI (20 orang) pada jam istirahat ternyata para peserta didik kadang-kadang kurang begitu memahami dengan istilah asing yang ada di berita politik sebesar (33%), dan ternyata siswa di sana (53,4%) kadang-kadang membaca berita politik, kemudian dari responden yang ada ternyata di sekolah mereka sudah berlangganan dan tersedia berbagai media informasi baik koran, dan majalah serta dalam pembelajaranpun siswa diberi

kesempatan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumber belajar bacaan. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan siswa dapat termotivasi untuk berpikir kritis, serta aktif dalam mengikuti pembelajaran tersebut dan lebih memahami berita politik sebagai media belajar dalam pembelajaran PKn.

Atas permasalahan yang diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang dirumuskan sebagai berikut:

“Pemanfaatan Berita Politik Pada Media Cetak Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Lembang)”.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peranan berita politik di media cetak sebagai media belajar dalam pembelajaran PKn kelas XI SMA N 1 Lembang?”

Untuk lebih jelasnya rumusan masalah diatas dispesifikasikan sebagai berikut:

1. Sejauhmana intensitas penggunaan berita politik pada media cetak sebagai media pembelajaran PKn bagi guru dan khususnya siswa?
2. Manfaat apa saja dari berita politik sebagai media pembelajaran PKn bagi siswa di persekolahan?
3. Bagaimana implementasi pemanfaatan berita politik sebagai media pembelajaran PKn bagi siswa dan guru?

4. Kendala apa saja yang ada dalam pemanfaatan berita politik pada media cetak sebagai media pembelajaran PKn?
5. Upaya apa saja dalam menanggulangi kendala yang ada dalam pemanfaatan berita politik pada media cetak sebagai media pembelajaran PKn?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, dan memperoleh data jawaban permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu mengenai pemanfaatan berita politik sebagai media pembelajaran PKn yang ada di SMA N 1 Lembang.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a) Untuk mengetahui sejauh mana intensitas penggunaan berita politik di media cetak sebagai media pembelajaran PKn bagi guru dan khususnya siswa.
- b) Untuk mengetahui manfaat apa saja dari berita politik sebagai media pembelajaran PKn bagi siswa di persekolahan.
- c) Untuk mengetahui implementasi pemanfaatan berita politik sebagai media pembelajaran PKn bagi siswa dan guru.
- d) Mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatan berita politik di media cetak sebagai media pembelajaran PKn.

- e) Mengidentifikasi upaya dalam menanggulangi kendala yang ada dalam pemanfaatan berita politik di media cetak sebagai media pembelajaran PKn.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemanfaatan berita politik di media cetak sebagai media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam materi Budaya Politik di persekolahan dan Pendidikan Politik di perkuliahan..

2. Secara praktis

- a) Dapat ikut serta dalam penerapan partisipasi politik yang aktif, kritis dan bertanggung jawab serta dapat diketahuinya manfaat berita politik sebagai media pembelajaran PKn dalam memahami budaya politik.
- b) Sebagai bahan masukan pengajaran upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dan dapat mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa melalui berita politik sebagai media pembelajaran.
- c) Memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam penyusunan atau pengembangan teori pendidikan, memberi alternatif metode dan model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam media pembelajaran PKn di persekolahan.

E. Anggapan Dasar

Anggapan dasar (asumsi) pada penelitian, menurut Suharsimi Arikunto (2006: 65) adalah:

1. Agar ada dasar berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti.
2. Guna mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatiannya.
3. Guna menentukan dan merumuskan tujuan.

Bagian dari media khususnya yaitu media masa atau pers yang banyak menyuguhkan informasi politik yaitu berita, karena masalah yang diangkatnya mengenai politik, maka berita itu disebut berita politik.

1. Menurut Kartini Kartono (2009:65), berpendapat bahwa unsur pendidikan dalam pendidikan politik pada hakekatnya merupakan aktifitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam *person*, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi kondisi lingkungan sekitarnya.
2. Dalam Djamarah dan Zain (2010:120), kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Jadi, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.
3. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang berperan sebagai wadah dalam mengajarkan, mengembangkan dan melestarikan nilai moral dan norma yang berakar dari budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diaplikasikan peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut Mowlana dan Wilson (1990) dalam Karim (... :3), penerapan pemanfaatan berita politik di SMA dinilai penting, karena urgensi pengembangan kognisi politik siswa SMA sebagian besar dari generasi muda kita dalam konteks pembangunan sistem politik yang sehat, menyangkut peranan yang mungkin dimainkan media masa dalam kedudukannya sebagai infrastruktur politik.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan teknik deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang dilakukan di lapangan untuk meneliti hal-hal yang terjadi pada masa sekarang dan memerlukan pemecahan masalah. Metode survey adalah pengamatan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan didalam suatu daerah tertentu.

Sesuai dengan metode penelitian tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran real mengenai pemanfaatan berita politik sebagai media belajar dalam pembelajaran PKn.

G. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Zaenal Arifin (2009:158) mengartikan wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) atau guru dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) atau peserta didik tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media, jadi tidak menemui langsung kepada sumbernya.

2. Observasi

Menurut Zaenal Arifin (2009:153), observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut pedoman observasi.

3. Studi Dokumentasi

Endang Danial (2009:79) mendefinisikan studi dokumentasi ialah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan sebagainya.

H. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi sampel penelitiannya seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:297) bahwa, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Subjek dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas XI SMA N 1 Lembang. Lokasi penelitiannya bertempat di SMA Negeri 1 Lembang, yang berada di jalan Maribaya 68 Lembang.